



# Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Nurfitri Zulaika<sup>1</sup>, Desty Lestari<sup>2</sup>, Hanifah Istiqomah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang, Indonesia

E-mail: [nurfitrizulaika@gmail.com](mailto:nurfitrizulaika@gmail.com)<sup>1</sup>, [desty120@gmail.com](mailto:desty120@gmail.com)<sup>2</sup>, [kahaniistiqomah@gmail.com](mailto:kahaniistiqomah@gmail.com)<sup>3</sup>

## Article Info

### Article history:

Received June 17, 2025

Revised June 28, 2025

Accepted July 03, 2025

### Keywords:

Free Nutritious Meals, Policy Implementation, Public Budgeting, Accountability, Local Supervision.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation challenges and potential weaknesses in budget accountability within the Free Nutritious Meal (MBG) Program, based on Presidential Instruction No. 1 of 2025. Using a literature study approach, this research analyzes academic sources, media reports, and public policy documents. The findings reveal that the MBG implementation faces multidimensional challenges, including budget constraints, human resource capacity issues, uneven infrastructure, and weak inter-agency coordination. On the accountability side, problems emerge from the complexity of reporting systems, limited internal monitoring capacity, and high risks of corruption in local procurement processes. The study recommends policy redesign by strengthening data integration, simplifying reporting mechanisms, and developing a technology-based, participatory monitoring system. Future field studies are necessary to validate these findings and develop a more adaptive and transparent accountability model.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received June 17, 2025

Revised June 28, 2025

Accepted July 03, 2025

### Keywords:

Makanan Bergizi Gratis, Implementasi Kebijakan, Anggaran Publik, Akuntabilitas, Pengawasan Daerah.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan implementasi dan potensi kelemahan akuntabilitas anggaran dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai sumber literatur, laporan media, dan dokumen kebijakan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan implementasi MBG bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak merata, serta lemahnya koordinasi antarlembaga pelaksana. Di sisi lain, potensi kelemahan akuntabilitas tercermin pada kompleksitas sistem pelaporan, keterbatasan pengawasan internal, dan tingginya risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan desain kebijakan dengan memperkuat integrasi data, penyederhanaan pelaporan, serta pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi publik. Selain itu, penting dilakukan studi lapangan lanjutan untuk validasi temuan serta penyusunan model pengawasan yang lebih adaptif dan transparan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

**Corresponding Author:**

Nurfitri Zulaika

STIE Pembangunan Tanjungpinang

E-mail: [nurfitrizulaika@gmail.com](mailto:nurfitrizulaika@gmail.com)**Pendahuluan**

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan dan strategis dalam kerangka pembangunan manusia yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye hingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam rangka mempercepat implementasinya, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis. Inpres ini menjadi kerangka legal yang mewajibkan sinergi antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan MBG. Skala program ini sangat besar, mencakup sekitar 83 juta anak usia PAUD dan SD yang tersebar di 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp 70–90 triliun per tahun. Jika dikalkulasi selama lima tahun pemerintahan, total anggaran yang diperlukan dapat mencapai Rp 400 triliun (Kompas, 2025);( Katadata, 2025) Besarnya anggaran tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program intervensi sosial terbesar dalam sejarah keuangan negara di Indonesia, bahkan mengungguli beberapa program populis sebelumnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun, besarnya ambisi dan skala program tersebut tidak sebanding dengan kesiapan infrastruktur pelaksanaan, terutama di tingkat daerah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh LPEM FEB UI (2024) dalam berita Antara, (2024), terdapat ketimpangan besar dalam kapasitas fiskal daerah, kompetensi sumber daya manusia, hingga sistem logistik lokal dalam mendukung distribusi dan pengadaan makanan bergizi yang sesuai standar kesehatan. Kementerian Dalam Negeri bahkan mencatat bahwa 43% pemerintah kabupaten/kota masih belum memiliki basis data anak usia sekolah yang valid dan terintegrasi dengan sistem perlindungan sosial nasional. Di sisi lain, akuntabilitas anggaran menjadi perhatian besar publik dan pengamat. Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW, 2025) menunjukkan bahwa program dengan transfer anggaran besar ke daerah kerap menjadi celah terjadinya korupsi, markup, dan penyalahgunaan kewenangan, terutama jika mekanisme pengawasan tidak dibarengi dengan transparansi berbasis data dan partisipasi masyarakat. Pengalaman serupa juga ditemukan dalam evaluasi Program Makanan Tambahan (PMT) yang dikelola Kementerian Kesehatan, di mana penyaluran tidak tepat sasaran, kualitas makanan di bawah standar, serta ketidaksesuaian laporan dengan realisasi lapangan menjadi temuan umum.

Dalam wacana publik, muncul kekhawatiran bahwa Program MBG bisa menjadi “ladang korupsi baru” jika pelaksanaannya tidak didesain dengan model pengawasan yang kuat, transparan, dan responsif. Beberapa ahli menyoroti minimnya perhatian terhadap aspek desain sistem informasi akuntabilitas yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, serta belum jelasnya skema audit dan pelaporan berkala yang bisa diakses publik. Padahal, dalam konteks kebijakan publik, akuntabilitas fiskal merupakan instrumen krusial yang tidak hanya mencegah penyalahgunaan anggaran, tetapi juga memastikan efektivitas dan efisiensi program (Hood, 2010) dalam Akbar,Rusdi 2018). Oleh karena itu, urgensi untuk melakukan



kajian akademik terhadap tantangan implementasi serta potensi kelemahan dalam model akuntabilitas MBG menjadi semakin penting, terutama sebelum program ini diimplementasikan secara luas mulai Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan analisis kebijakan yang berkembang, liputan media nasional, dan diskusi para pakar kebijakan publik, penelitian ini berfokus untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, apa saja tantangan mendasar yang diprediksi akan muncul dalam pelaksanaan anggaran program MBG, khususnya di tingkat daerah yang berperan sebagai pelaksana utama? Kedua, bagaimana konstruksi model akuntabilitas anggaran MBG dibahas dalam ruang publik, dan apa saja potensi kelemahannya menurut pengamat, akademisi, serta lembaga pengawasan? Kedua pertanyaan tersebut menjadi landasan penting untuk menelaah sejauh mana kesiapan negara dalam melaksanakan program sebesar MBG tanpa menimbulkan risiko kebocoran, inefisiensi, atau bahkan kegagalan program di lapangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis dan komprehensif berbagai tantangan potensial yang dapat menghambat efektivitas implementasi anggaran program MBG di tingkat daerah berdasarkan sintesis literatur kebijakan, data statistik, serta analisis kebijakan terbaru. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kelemahan dalam sistem akuntabilitas anggaran MBG, baik dari aspek regulasi, desain tata kelola, maupun praktik pengawasan yang telah atau akan diterapkan. Dengan hasil kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyiapkan skema implementasi dan pengawasan program MBG yang efektif, transparan, dan akuntabel.

## **Kajian Teori**

### **Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena merupakan momen transisi dari formulasi menuju realisasi tujuan konkret. Salah satu kerangka teoritis paling berpengaruh untuk menganalisis proses implementasi adalah model dari George C. Edwards III, yang diperkenalkan dalam karyanya *Implementing Public Policy* (1980) dalam Mubarok et al, (2020). Menurut Edwards, kegagalan implementasi bukan hanya disebabkan oleh kelemahan pada perumusan kebijakan, melainkan juga karena kendala struktural dan dinamika aktor pelaksana. Empat variabel utama yang dianggap menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dalam kerangka ini meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pertama, komunikasi menyangkut proses penyampaian kebijakan dari pembuat kepada pelaksana. Kejelasan, konsistensi, serta intensitas komunikasi sangat mempengaruhi interpretasi dan tindakan aktor pelaksana. Dalam konteks Program MBG, komunikasi kebijakan harus menjangkau berbagai tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga desa, agar instruksi tidak mengalami bias makna atau multitafsir. Terlebih, program ini bersifat multisektor dan melibatkan instansi teknis berbeda seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pangan, yang memiliki latar belakang fungsi dan struktur operasional yang beragam.

Kedua, sumber daya mencakup alokasi anggaran, ketersediaan tenaga pelaksana, peralatan, serta dukungan sistem informasi. Implementasi kebijakan sebesar MBG tentu memerlukan sumber daya yang tidak hanya besar, tetapi juga tepat waktu, merata, dan fleksibel. Kurangnya sumber daya, seperti keterbatasan SDM di sekolah dasar terpencil atau



daerah dengan fiskal rendah, akan menghambat distribusi makanan, pelaporan, dan pengawasan.

Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana menjadi variabel kunci karena sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan motivasi. Pelaksana yang tidak memahami pentingnya program atau merasa terbebani oleh tambahan tugas tanpa insentif dapat bersikap pasif atau bahkan menolak. Dalam banyak kasus program sosial di Indonesia, keberhasilan program sering kali bergantung pada komitmen personal pelaksana lapangan (teacher leaders, kepala desa, tenaga gizi lokal) yang tidak selalu mendapatkan pelatihan atau dukungan struktural yang memadai.

Keempat, struktur birokrasi meliputi organisasi, prosedur, dan aturan yang menjadi wadah implementasi. Dalam praktiknya, birokrasi yang terlalu hirarkis dan rigid cenderung memperlambat inovasi dan respons terhadap dinamika lapangan. MBG, sebagai program dengan cakupan nasional dan format desentralisasi anggaran, berisiko menghadapi keterlambatan jika tidak diimbangi dengan fleksibilitas dan sistem koordinasi antarlembaga yang kuat. Hal ini diperparah dengan tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah yang kerap terjadi dalam program bantuan sosial.

Dalam perkembangannya, kerangka Edwards III masih relevan dan banyak digunakan oleh peneliti di negara berkembang untuk mengkaji kegagalan implementasi, termasuk di Indonesia. Misalnya, studi oleh Septiani & Nugroho (2022) menemukan bahwa dalam program Dana BOS, kendala terbesar bukan terletak pada desain kebijakan, melainkan pada miskomunikasi antar aktor dan keterbatasan sistem akuntabilitas pelaksana.

### **Penganggaran Sektor Publik**

Akuntabilitas anggaran merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang secara fundamental menuntut bahwa pengelolaan keuangan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik dan lembaga pengawas. Akuntabilitas ini bersifat multi-dimensi, mencakup akuntabilitas keuangan (*financial accountability*), akuntabilitas kinerja (*performance accountability*), serta akuntabilitas administratif (*administrative accountability*) (Romzek & Dubnick, 1987).

Akuntabilitas keuangan menitikberatkan pada transparansi dalam penggunaan anggaran negara dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam konteks program MBG, hal ini menyangkut kejelasan jumlah dana yang disalurkan, siapa penerimanya, bagaimana pengadaan makanan dilakukan, dan sejauh mana dana digunakan sesuai peruntukannya. Sementara itu, akuntabilitas kinerja merujuk pada kemampuan pelaksana program dalam mencapai target sasaran, baik dari segi cakupan peserta, kualitas gizi makanan, hingga dampaknya terhadap indikator kesehatan dan pendidikan anak.

Untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran, konsep Value for Money (VfM) menjadi kerangka evaluasi utama yang diadopsi banyak lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, dan BPK RI. Konsep ini menilai program dari tiga indikator: (1) ekonomi – kemampuan memperoleh input dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik, (2) efisiensi – rasio antara input dan output, dan (3) efektivitas – sejauh mana tujuan program tercapai (BPK RI, 2025)(The World Bank, 2008) (World Bank, 2020)

Namun dalam praktiknya, banyak program sosial di Indonesia masih terjebak pada akuntabilitas administratif yang bersifat dokumen formal, bukan pada substansi pencapaian. Sebagai contoh, temuan (KPK, n.d.) pada program makanan tambahan menunjukkan bahwa



laporan keuangan dibuat tepat waktu dan lengkap secara administratif, tetapi kualitas makanan dan dampaknya terhadap gizi anak tidak terpantau secara sistematis. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa sistem pengawasan MBG harus berorientasi pada hasil (*result-based accountability*), bukan sekadar pada laporan administratif.

Selain itu, pendekatan *citizen-centric accountability* atau akuntabilitas berbasis partisipasi masyarakat mulai banyak didorong oleh akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan, penyampaian umpan balik, serta keterlibatan dalam perencanaan anggaran lokal dapat meningkatkan transparansi dan mencegah penyimpangan, terutama di daerah yang kapasitas birokrasinya lemah (ICW, 2025); (KemenKeu, Faslan Syam Sajiah, 2021)

### **Pembelajaran dari Program Serupa**

Berbagai program bantuan sosial dan transfer fiskal dari pusat ke daerah yang telah dijalankan di Indonesia dapat dijadikan rujukan untuk memahami potensi tantangan yang mungkin dihadapi MBG. Salah satu program yang relevan untuk dikaji adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini memberikan dana langsung ke rekening sekolah dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan operasional pendidikan dasar. Meskipun telah berjalan selama lebih dari satu dekade, BOS kerap menghadapi permasalahan seperti pelaporan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, penggunaan dana yang tidak sesuai juknis, serta keterbatasan kapasitas SDM sekolah dalam perencanaan dan pelaporan (World Bank, 2020); (Kemendikbud, 2021).

Contoh lainnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada rumah tangga miskin untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Meskipun PKH terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan, beberapa evaluasi menunjukkan adanya kelemahan dalam validitas data penerima, rendahnya pengawasan lapangan, dan kesenjangan informasi antar lembaga pelaksana (Bappenas, 2021).

Dari program-program tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan umum yang sering terjadi antara lain adalah: (1) lemahnya integrasi sistem data penerima manfaat, (2) ketidaksesuaian pelaporan dengan realisasi lapangan, (3) kurangnya transparansi dalam pengadaan barang atau jasa, dan (4) pengawasan yang bersifat formalistik. Jika tidak diantisipasi sejak awal, MBG juga berpotensi mengalami masalah serupa, mengingat kompleksitas program ini jauh lebih tinggi dan cakupannya jauh lebih luas.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini memakai metode studi pustaka (*literature study*) untuk menelusuri dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan topik. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tantangan implementasi serta akuntabilitas anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, artikel media terpercaya, dan dokumen kebijakan. Studi pustaka mencakup aktivitas mencari, membaca, mencatat, dan mengolah referensi yang relevan sebagai dasar kajian (Dyah Ayu Pramoda Wardani, Ele Firda Pujiastutik, 2024).

### **Hasil dan Pembahasan**



Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Sekolah Dasar, yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar dan produktivitas jangka panjang. Namun, dalam proses implementasinya, terdapat sejumlah tantangan yang telah disorot oleh berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi, pengamat kebijakan, media massa, maupun lembaga pengawasan. Berdasarkan sintesis literatur yang dikaji, tantangan utama implementasi program MBG dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu tantangan terkait sumber daya dan tantangan terkait struktur birokrasi dan koordinasi. Salah satu tantangan krusial adalah kecukupan dan efektivitas pengalokasian sumber daya, khususnya dari segi anggaran. Beberapa ekonom dan pakar kebijakan fiskal menyoroti bahwa alokasi anggaran per anak (*unit cost*) dalam program MBG masih menjadi pertanyaan besar terkait kecukupannya. Menurut analisis World Bank (2022), anggaran yang terlalu rendah akan menyulitkan penyediaan makanan dengan kualitas gizi yang memadai, terutama jika memperhitungkan inflasi harga bahan pokok, variasi biaya antar daerah, serta ongkos logistik. Selain itu, jika anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal, maka terdapat potensi ketimpangan antara daerah satu dengan yang lain, yang dapat berdampak pada ketidakadilan dalam pelaksanaan. Dalam konteks tersebut, diperlukan perencanaan anggaran yang mempertimbangkan indikator lokal dan pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*) agar program dapat dijalankan secara merata dan berkeadilan.

Dari aspek sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan MBG sangat bergantung pada kesiapan tenaga pelaksana di lapangan seperti kepala sekolah, guru, tenaga dapur, pengelola logistik, serta aparat pemerintah desa. Namun, sejumlah laporan media dan studi evaluasi menunjukkan masih rendahnya kapasitas pelaksana dalam hal pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan pelaporan keuangan. Misalnya, Kompas, (2024) menyoroti bahwa banyak sekolah di wilayah terpencil belum memiliki personel yang terlatih dalam mengelola dana publik atau melakukan pelaporan digital sesuai sistem keuangan pemerintah. Ketidadaan pelatihan teknis dan tidak meratanya pemahaman terhadap aturan pengadaan menyebabkan pelaksana di tingkat bawah rentan melakukan kesalahan prosedural. Ketidaksiapan ini berpotensi menyebabkan kesalahan administratif, keterlambatan pelaporan, hingga penyimpangan penggunaan dana, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan terpadu, pendampingan teknis, dan penyediaan modul pelaksanaan MBG menjadi langkah mendesak yang harus diambil pemerintah sebelum program diterapkan secara penuh.

Masalah infrastruktur pun menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan hasil pemetaan infrastruktur dasar oleh (Bappenas, 2009), ditemukan bahwa lebih dari 40% sekolah dasar di daerah perdesaan belum memiliki fasilitas dasar pendukung pelaksanaan MBG. Infrastruktur yang dimaksud mencakup dapur sekolah, peralatan memasak, tempat makan layak, sumber air bersih, serta akses listrik stabil. Tantangan ini diperparah oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), yang menghadapi kendala distribusi logistik dan ketergantungan pada kondisi cuaca. Sebagai contoh, di beberapa kabupaten di Papua dan Maluku, akses logistik hanya bisa dilakukan melalui laut atau udara dengan biaya sangat tinggi. Tanpa perbaikan infrastruktur dan dukungan logistik yang memadai, program MBG berisiko gagal diterapkan di wilayah-wilayah tersebut, yang justru menjadi daerah dengan angka stunting tertinggi.

Selain aspek sumber daya, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi antar lembaga pelaksana. Salah satu masalah utama adalah validitas dan sinkronisasi data penerima manfaat. Pengalaman dari



program sosial lainnya di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai, menunjukkan bahwa kesalahan data seringkali menyebabkan salah sasaran. Dalam konteks MBG, data peserta didik yang menjadi sasaran harus akurat, terkini, dan terintegrasi antara sistem Dapodik Kementerian Pendidikan, data gizi Kementerian Kesehatan, dan basis data kesejahteraan dari Kementerian Sosial. Ketidaksinkronan ini dapat menyebabkan tumpang tindih data atau bahkan eksklusi peserta yang seharusnya menerima manfaat. Dibutuhkan integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta dashboard nasional yang mampu menampung, menyaring, dan memperbaharui data secara real-time agar pelaksanaan MBG tepat sasaran.

Masalah lainnya adalah koordinasi antar lembaga. Program MBG melibatkan setidaknya empat kementerian utama serta pemerintah daerah di berbagai tingkat. Tanpa adanya sistem koordinasi yang solid, potensi konflik kewenangan, ego sektoral, serta duplikasi peran sangat mungkin terjadi. Nugroho (2021) menyebutkan bahwa koordinasi antar lembaga dalam program multisektor memerlukan kepemimpinan yang kuat, struktur manajemen lintas sektor yang jelas, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi bersama. Jika tidak dikelola dengan baik, koordinasi yang lemah ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan penyaluran anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan gugus tugas lintas sektor di tingkat pusat dan daerah yang memiliki mandat legal serta didukung sistem komunikasi digital terpadu.

Isu akuntabilitas menjadi dimensi penting dalam pelaksanaan MBG karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban penggunaan dana publik yang besar. Dalam berbagai diskusi publik, analisis akademik, serta sorotan media, ditemukan tiga aspek utama yang menjadi perhatian dalam konteks akuntabilitas anggaran MBG: mekanisme pelaporan, kapasitas pengawasan, dan kerawanan korupsi. Pelaksanaan MBG diharuskan mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, terutama dalam hal pelaporan penggunaan anggaran. Namun, para ahli kebijakan publik mengkhawatirkan bahwa sistem pelaporan yang terlalu kompleks dan berbasis digital dapat menjadi beban tambahan bagi pelaksana di lapangan. Kepala sekolah dan operator sekolah di banyak daerah belum terbiasa dengan pelaporan berbasis aplikasi, sementara beban administrasi dari program lain seperti BOS sudah cukup berat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaporan akan bersifat formalistik dan sekadar memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai alat evaluasi substansi penggunaan anggaran. Maka dari itu, diperlukan sistem pelaporan yang terintegrasi, mudah diakses, dan mampu menampilkan performa program secara real-time melalui indikator hasil dan dampak.

Pengawasan internal terhadap program MBG akan sangat bergantung pada kapasitas Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, menurut laporan (ICW, 2025), jumlah auditor aktif di banyak daerah sangat terbatas, bahkan ada kabupaten/kota yang hanya memiliki satu hingga dua orang auditor untuk mengawasi seluruh kegiatan APBD. Dengan kondisi seperti ini, pengawasan program sebesar MBG menjadi tantangan besar. Di sisi lain, pengawasan masyarakat yang berbasis partisipatif juga belum terbangun dengan baik, terutama karena rendahnya literasi anggaran dan keterbukaan informasi publik di tingkat lokal. Untuk mengatasinya, perlu penguatan kapasitas inspektorat melalui penambahan SDM dan anggaran, serta pelibatan masyarakat melalui forum warga, aplikasi pengaduan, dan transparansi anggaran berbasis web.

Aspek terakhir yang menjadi perhatian publik adalah potensi korupsi dalam pelaksanaan MBG, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan pengalaman dari program sejenis seperti bantuan sosial COVID-19 dan pengadaan makanan



tambahan balita, titik rawan korupsi sering terjadi dalam bentuk mark-up harga, kolusi antara pelaksana dengan penyedia, serta suap dalam proses pemilihan vendor. Investigasi dari Tempo (2023) menunjukkan bahwa tanpa sistem pengadaan yang transparan dan terintegrasi, serta tanpa pengawasan ketat dari masyarakat dan auditor, praktik penyimpangan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, desain program MBG harus mencakup sistem pengadaan digital (*e-catalogue* dan *e-procurement*), keterbukaan data kontrak melalui portal LKPP, serta mekanisme pelaporan masyarakat (*whistleblowing system*) sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas publik. Selain itu, audit investigatif secara berkala dan partisipasi lembaga independen seperti KPK dan Ombudsman juga perlu didorong untuk menjaga integritas pelaksanaan.

## Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur dan hasil analisis terhadap berbagai sumber terpercaya, disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan inisiatif ambisius yang menghadirkan tantangan besar, baik secara teknis maupun kelembagaan. Dari aspek implementasi, tantangan utama terletak pada aspek pembiayaan, yakni kecukupan alokasi anggaran per anak yang belum tentu mampu menjamin kualitas makanan sesuai standar gizi nasional. Selain itu, masih banyak sekolah terutama di wilayah 3T yang belum memiliki infrastruktur dasar seperti dapur sekolah dan peralatan masak yang layak, sehingga pelaksanaan MBG akan menghadapi kendala logistik yang serius.

Dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan kapasitas pelaksana seperti guru dan kepala sekolah dalam mengelola anggaran serta mengoperasikan sistem pelaporan digital juga menjadi kendala potensial yang dapat menghambat kelancaran program. Tantangan berikutnya menyangkut validitas dan sinkronisasi data penerima manfaat. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan salah sasaran dan ketimpangan distribusi manfaat antar daerah. Lemahnya koordinasi antar instansi pelaksana seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Keuangan, dan pemerintah daerah berpotensi memperlambat pengambilan keputusan, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta menghambat efektivitas pelaksanaan program.

Dari aspek akuntabilitas, terdapat kekhawatiran mengenai rumitnya sistem pelaporan yang dapat membebani pelaksana lapangan, terbatasnya kapasitas pengawasan oleh inspektorat daerah, serta belum optimalnya peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa yang tidak transparan dan belum sepenuhnya terdigitalisasi dinilai menjadi titik rawan utama terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada penguatan tata kelola, transparansi data, kejelasan mekanisme pelaporan, dan sistem pengawasan yang terintegrasi dan berdaya jangkauan luas.

### Saran

Pemerintah perlu memprioritaskan validasi dan integrasi data penerima MBG secara real-time menggunakan basis NIK, menyederhanakan mekanisme pelaporan agar tidak membebani pelaksana lapangan, dan membangun sistem pengawasan yang berbasis teknologi informasi yang transparan, partisipatif, dan mudah diakses publik. Sistem ini sebaiknya dilengkapi dengan kanal pengaduan masyarakat, audit berkala, dan dashboard evaluasi publik.



Selain itu, pembentukan gugus tugas lintas kementerian dengan mandat yang jelas sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat pengambilan keputusan. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya dukungan pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas SDM di sekolah-sekolah penerima program.

Untuk memperkuat hasil studi literatur ini, dibutuhkan penelitian primer (studi lapangan) di berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda, khususnya di daerah 3T, guna menguji dan memvalidasi secara empiris tantangan implementasi dan akuntabilitas yang telah diidentifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih konkret dan berbasis konteks lokal terhadap kebijakan nasional MBG ke depan. Selain itu, studi komparatif antar daerah atau dengan program sejenis di negara lain juga perlu dilakukan guna mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dan model pelaksanaan yang paling efektif dan efisien.

### **Daftar Pustaka**

- Akbar, R. (2018). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jaap.35332>
- Bank, W. (n.d.). indonesia-public-expenditure-review @ [www.worldbank.org. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review?](https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review?)
- Bank, W. (2020). indonesia-public-expenditure-review @ [www.worldbank.org. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review?ut](https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review?ut)
- Bappenas. (2009). Laporan Akhir Evaluasi Program Perlindungan Sosial: Program Keluarga Harapan 2009.3–78.
- Bappenas. (2021). bappenas-beberkan-4-tantangan-utama-dalam-integrasi-data-bansos @ [ekonomi.bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210302/9/1362616/bappenas-beberkan-4-tantangan-utama-dalam-integrasi-data-bansos?](https://ekonomi.bisnis.com/read/20210302/9/1362616/bappenas-beberkan-4-tantangan-utama-dalam-integrasi-data-bansos?)
- Basyari, I. (2025). efisiensi-anggaran-rp-306-triliun-terbuka-untuk-danai-makan-bergizi-gratis @ [www.kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/efisiensi-anggaran-rp-306-triliun-terbuka-untuk-danai-makan-bergizi-gratis?](https://www.kompas.id/artikel/efisiensi-anggaran-rp-306-triliun-terbuka-untuk-danai-makan-bergizi-gratis?)
- Dyah Ayu Pramoda Wardani, 1 Ele Firda Pujiastutik2, N. sholekha3. (2024). Efektivitas Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Kemampuan Literasi Numerasi Untuk Meningkatkan Berfikir Kritis Siswa. *Primary Educatoin Journal*, 4(3), 1–23.
- ICW. (2025). anggaran-rentan-bocor-tata-kelola-pemerintah-dinilai-masih-buruk @ [www.kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/anggaran-rentan-bocor-tata-kelola-pemerintah-dinilai-masih-buruk?](https://www.kompas.id/artikel/anggaran-rentan-bocor-tata-kelola-pemerintah-dinilai-masih-buruk?)
- Kemendikbud. (2021). 3132-tahun-2021-dana-bos-bagi-sekolah-di-daerah-3t-ditambah @ [www.kemendikdasmen.go.id. https://www.kemendikdasmen.go.id/berita/3132-tahun-2021-dana-bos-bagi-sekolah-di-daerah-3t-ditambah?](https://www.kemendikdasmen.go.id/berita/3132-tahun-2021-dana-bos-bagi-sekolah-di-daerah-3t-ditambah?)



- KemenKeu, F. S. S. (2021). citizen-budget-untuk-peningkatan-partisipasi-warga @ opini.kemenkeu.go.id. <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/citizen-budget-untuk-peningkatan-partisipasi-warga?>
- Kompas. (2024). menghentikan-korupsi-dana-bos @ www.kompas.com. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/08/20/133109171/menghentikan-korupsi-dana-bos>
- KPK. (n.d.). kpk-ikut-awasi-program-makan-bergizi-gratis-ingatkan-potensi-fraud-dan-dorong-transparansi @ kpk.go.id. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-ikut-awasi-program-makan-bergizi-gratis-ingatkan-potensi-fraud-dan-dorong-transparansi?>
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- RI, B. (2025). bpk-apresiasi-komitmen-pemprov-ntb-pertahankan-wtp-berturut-turut-sejak-2011 @ www.bpk.go.id. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-apresiasi-komitmen-pemprov-ntb-pertahankan-wtp-berturut-turut-sejak-2011>
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227. <https://doi.org/10.2307/975901>
- Saputra, A. (2024). lpem-ui-soroti-keterkaitan-inflasi-tinggi-dengan-prevalensi-stunting @ www.antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/4130808/lpem-ui-soroti-keterkaitan-inflasi-tinggi-dengan-prevalensi-stunting?>
- The World Bank. (2008). Spending for Development: making the most of Indonesia's new opportunities (Vol. 23, Issue 2).
- Theodora, A. (2025). anggaran-makan-bergizi-gratis-dapat-membengkak-jadi-rp-171-triliun-di-tahun-pertama @ www.kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/anggaran-makan-bergizi-gratis-dapat-membengkak-jadi-rp-171-triliun-di-tahun-pertama?>